

## ANALISIS USAHA TAMBAK GARAM DI DESA GEDONGMULYO KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG

### COST REVENUE ANALYSIS OF SALT FARMING IN GEDONGMULYO SUBDISTRICT OF LASEM REMBANG REGENCY

Ragil P. Andriyani, Suadi\* dan Supardjo S. Djasmani

Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada  
Jl. Flora Gedung A4, Bulaksumur Yogyakarta 55281

\*Penulis untuk korespondensi, E-mail: suadi@ugm.ac.id

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur biaya dan pendapatan usaha tambak garam di Desa Gedongmulyo, Kecamatan Lasem, Rembang. Seluruh petambak yang berjumlah 30 orang dipilih sebagai responden dan diwawancarai menggunakan kuesioner semi terbuka. Hasil penelitian menunjukkan responden memiliki luas lahan garapan yang bervariasi dari 750 m<sup>2</sup> sampai 220.000 m<sup>2</sup>. Analisis usaha dihitung dengan basis luas lahan garapan yang dikonversi ke dalam satu hektar per tahun. Total biaya usaha tambak garam mencapai Rp35.267.668/hektar, dengan proporsi terbesar dialokasikan untuk biaya tenaga kerja, yaitu mencapai Rp20.894.631 (59,24%). Total penerimaan usaha mencapai Rp 53.076.281, yang terdiri dari penerimaan garam sebesar Rp41.308.681 (77,83%) dan penerimaan bandeng sebesar Rp11.767.600 (22,17%). Pendapatan usaha tambak garam diperkirakan Rp17.808.613 per hektar per tahun. Analisis R/C rasio menunjukkan usaha tambak garam dengan nilai 1,50, yang berarti usaha tersebut layak untuk dikembangkan. Terdapat beberapa tantangan keberlanjutan usaha pegaraman, diantaranya adalah variabilitas iklim, pasar dan pemasaran produk serta kelembagaan usaha. Permasalahan tersebut memerlukan dukungan kebijakan dan program yang tepat untuk menjamin keberlanjutan usaha garam rakyat.

**Kata kunci:** bandeng, biaya, pendapatan, R/C rasio, tambak garam

#### Abstract

The purpose of this study was to determine the cost structure dan income of traditional salt farming at Gedongmulyo Village, Sub District of Lasem, Rembang. All salt farmers, account for 30 owners were selected as respondents and interviewed. The study indicated that respondents have varied farm land ranging from 750 m<sup>2</sup> to 220,000 m<sup>2</sup>. The cost and revenue analysis were using farm land that was converted into one hectare per year. The total cost of salt farming was counted for Rp. 35,267,668 which mostly allocated for labor cost, account for Rp. 20,894,631 (59,24%). The total revenue of the business was Rp. 53,076,281 per hectare, comprises of revenue from salt production, amount of Rp. 41,308,681 and milkfish production account for Rp. 11,767,600. Therefore, farmer income was calculated at Rp. 17,808,613 per hectare. The study also indicated that R/C ratio was 1.50, which means that the business was worth to be developed and expanded. Nevertheless, there were few challenges, including the issue on climate variability, salt market and marketing, and business management. Appropriate policies and supporting programs are need to ensure the sustainability of the people business.

**Key words:** cost, milkfish, revenue, R/C ratio, salt farming

#### Pengantar

Garam merupakan komoditas strategis karena menjadi kebutuhan pokok. Menurut data Kementerian Perdagangan kebutuhan garam per kapita rata-rata 4 kg, sehingga dibutuhkan sekitar 2.87 juta ton garam konsumsi per tahun, belum termasuk kebutuhan industri (Rusliana, 2013). Kebutuhan tersebut,

sebagian telah dipenuhi melalui impor garam sejak tahun 1998. Selain untuk konsumsi, garam juga dibutuhkan oleh berbagai industri (garam industri) seperti industri soda, cuka, industri logam, industri kaca, kertas, dan industri petrokimia, maupun untuk industri farmasi seperti untuk infus, shampo, dan cairan dialisat. Berdasarkan kebutuhan tersebut, pemerintah saat ini mendorong melalui berbagai

Tabel 1. Produksi dan luas tambak garam di Kabupaten Rembang tahun 2009.

No	Kecamatan	Luas Lahan Potensi (ha)	Luas Lahan Produksi (ha)	Potensi Pengembangan (ha)	Hasil Produksi (ton)
1	Kaliori	993,61	929,24	64,37	92.662
2	Rembang	242,78	242,78	0,00	18.469
3	Lasem	360,31	355,31	5,00	24.726
4	Sluke	31,49	30,49	1,00	2.307
5	Sarang	26,6	26,6	0,00	2.037
Total		1654,79	1584,42	70,37	140.201

Sumber: Anonim 2011a

program seperti program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meningkatkan kemampuan dalam penyediaan garam secara nasional. Siaran KKP pada tanggal 12 Desember 2012 menyebutkan KKP mengalokasikan anggaran PUGAR 2013 sebesar Rp74 miliar, yang ditujukan untuk bantuan langsung masyarakat, perbaikan infrastruktur, teknologi dan memperkuat kemitraan, sehingga tercapai produksi garam petambak PUGAR sebesar 1,889 juta ton.

Pengembangan usaha garam yang tergolong padat karya, selain akan meningkatkan pendapatan petambak garam juga akan menimbulkan *multiplier effect* berupa membuka kesempatan dan lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran, dan penanggulangan kemiskinan di wilayah pesisir. Secara nasional, daerah pengembangan usaha garam rakyat adalah Kabupaten Cirebon, Rembang, Pamekasan, Takalar, dan Kabupaten Bima. Menurut data Kementerian Perindustrian, pada kondisi iklim normal (musim kemarau 4,5-5,5 bulan), produksi garam dari sentra-sentra produksi tersebut dan wilayah pengembangan lainnya di Demak, Pati, Jeneponto dan Teluk Kupang mencapai sekitar 1,2-1,3 juta ton/tahun termasuk hasil produksi PT Garam sekitar 330 ribu ton (<http://www.kemenperin.go.id>). Namun seiring dengan terjadinya perubahan iklim global, pada tahun 2010 lalu produksi garam nasional mengalami penurunan drastis akibat musim hujan berkepanjangan.

Sebagai salah satu produsen garam penting di pesisir utara Jawa, Kabupaten Rembang memiliki posisi geografis strategis sebagai daerah potensial untuk produksi garam. Garam juga merupakan produk unggulan daerah di Kabupaten Rembang, bahkan garam tercantum dalam lambang daerah kabupaten Rembang, yaitu berupa gunung garam berwarna putih (BPS 2012). Terdapat 6 kecamatan di Kabupaten Rembang, 5 diantaranya mengusahakan lahannya sebagai lahan tambak garam (Tabel 1).

Kecamatan Lasem merupakan salah satu kecamatan yang menjadi produsen garam dan mengelola tambak garam suplementer dengan bandeng. Salah satu desa penghasil utama garam di Kecamatan Lasem adalah Desa Gedongmulyo. Lahan yang diperuntukkan untuk tambak di Desa Gedongmulyo seluas 198.922 m<sup>2</sup> baik tambak garam, tambak bandeng, dan tambak udang. Tahun 2009, Desa Gedongmulyo menyumbang sebesar 13.828 ton dari produksi total garam 4 desa di Kecamatan Lasem sebesar 24.726 ton atau sebesar 55,92% (Anonim, 2011b).

Perkembangan usaha garam sangat dinamis, baik oleh faktor alam, cuaca khususnya maupun oleh masalah pengelolaan dan pemasaran. Beberapa penelitian telah menyajikan permasalahan pengelolaan usaha tambak garam di Pantai Utara Jawa seperti yang telah dilaporkan Rochwulaningsih (2007; 2009). Petani Garam diketahui menghadapi persoalan struktural baik di tingkat petani (produsen), pasar, maupun kebijakan pemerintah, yang berkontribusi terhadap keterpurukan dan marginalisasi petani garam. Pada tingkat petani garam, petani menghadapi sistem bagi hasil yang tidak adil karena seluruh keputusan tergantung pada pemilik lahan. Struktur pasar garam juga bersifat monopolistik, sehingga dikuasai oleh pemilik modal (pembeli), sedangkan pelaku pada jalur produksi, yaitu petani kecil, penggarap cenderung tidak memiliki akses dan ekuitas pada jalur pemasaram garam. Di sisi lain, perlindungan terhadap produsen garam belum dilakukan dengan baik sehingga mereka mau dan mampu mempertahankan dan mengembangkan usaha pegaraman. Kondisi tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan terkait dengan kelayakan pengembangan usaha garam dan upaya pegaram menangani pengelolaan usaha pegaraman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan usaha tambak garam, struktur biaya dan pendapatan usaha, serta kelayakan usaha tambak garam di Desa Gedongmulyo, Kecamatan Lasem, Rembang.

## Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Gedongmulyo, yang merupakan salah satu sentra produksi garam di Kecamatan Lasem. Usaha tambak garam di desa tersebut dilakukan bersama dengan usaha budidaya bandeng. Responden dipilih dengan metode sensus, yaitu dengan menjadikan semua pemilik tambak garam yang berjumlah 30 orang sebagai responden. Selain data sekunder yang dikumpulkan dari instansi terkait maupun berbagai publikasi lainnya, data juga dikumpulkan dengan wawancara menggunakan kuesioner semi-terbuka (data primer) (Arikunto, 2002). Analisis usaha tambak garam dilakukan dengan menghitung total biaya, penerimaan, pendapatan, dan *return cost ratio* (R/C *ratio*). Perhitungan didekati dengan pendekatan yang disarankan oleh Soekartawi (1995), yaitu dengan menghitung total biaya (biaya tetap dan biaya tidak tetap atau variabel), penerimaan, dan kelayakan usaha dari aspek R/C *ratio*.

Total biaya (TC atau *total cost*) adalah jumlah biaya tetap (FC atau *fixed cost*) dan biaya tidak tetap (VC atau *variable cost*), yang dapat dituliskan :

$$TC = FC + VC \quad (1)$$

Pendapatan usaha tambak garam (Pd) merupakan selisih antara total penerimaan (TR atau *total revenue*) dan semua biaya yang dikeluarkan dari usaha tersebut (TC). Pendapatan dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$Pd = TR - TC \quad (2)$$

R/C *ratio* (a) diperoleh dengan membandingkan antara penerimaan (R atau *revenue*) dengan biaya (C atau *cost*). Penerimaan (R) dalam hal ini merupakan jumlah barang yang diproduksi dari usaha tambak (Y atau *output*) dikalikan dengan harga per satuan barang yang diproduksi (Py atau harga per unit output). Usaha tambak garam dikatakan layak/untung apabila memiliki nilai R/C lebih dari satu (R/C>1), tidak untung dan tidak rugi atau impas pada nilai R/C sama dengan satu (R/C=1) dan tidak layak/rugi jika R/C kurang dari satu (R/C<1). R/C *ratio* (a) dapat dituliskan sebagai berikut:

$$a = R/C \quad (3)$$

$$R = Py.Y \quad (3a)$$

$$C = FC + VC \quad (3b)$$

$$a = \{(Py \cdot Y) / (FC + VC)\} \quad (4)$$

Usaha tambak garam di Desa Gedongmulyo memiliki ciri yang khas, yaitu dilakukan dengan perpaduan antara pegaraman dan produksi ikan, khususnya bandeng. Karena itu, analisis usaha tambak memiliki dua komponen pembiayaan dan penerimaan yaitu, dari pegaraman dan budidaya bandeng. Secara konseptual, model usaha dan analisis usaha tambak garam tersebut tersaji pada Gambar 1. Gambar tersebut menunjukkan bahwa komponen biaya usaha tambak garam terdiri dari: (1) biaya tetap (FC) untuk garam (FCg) dan untuk bandeng (FCb), yang dialokasikan terutama untuk sewa lahan, pajak, pemeliharaan alat dan biaya penyusutan, dan (2) biaya variabel (VC) untuk garam (VCg) dan untuk bandeng (VCb) untuk bahan bakar, tenaga kerja, pakan, benih, dan obat-obatan. Total biaya (TC) merupakan penjumlahan dari alokasi biaya untuk FC dan VC. Total penerimaan (TR) usaha tambak garam terdiri dari: (3) penerimaan garam (TRg) dan (4) penerimaan bandeng (TRb). Selisih total penerimaan (TR) dengan total biaya (TC) merupakan pendapatan usaha tambak garam.

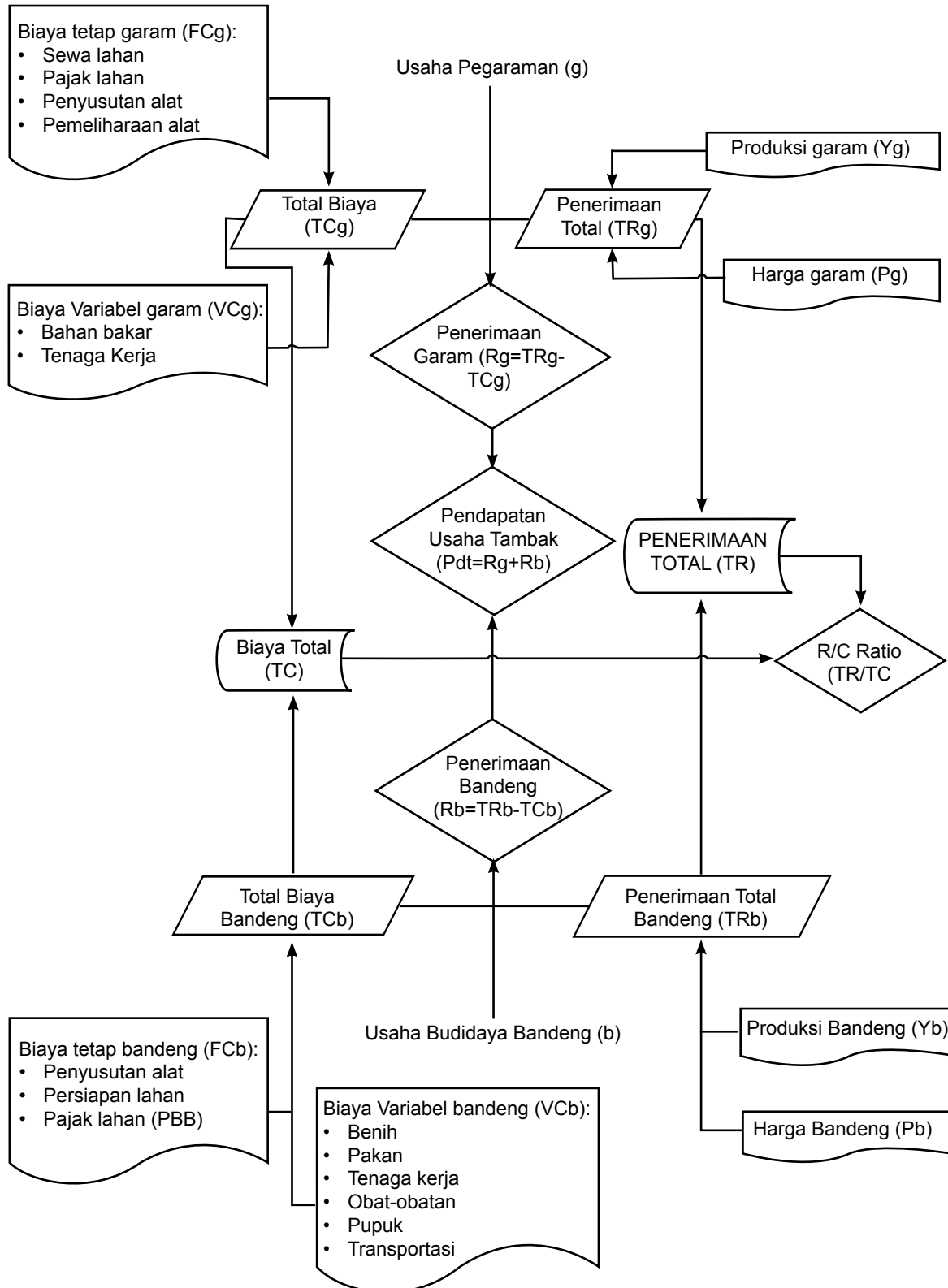
## Hasil dan Pembahasan

Tambak garam yang diusahakan di Desa Gedongmulyo merupakan perpaduan antara tambak garam dan usaha budidaya bandeng yang dikelola dalam satu petak tambak garam. Petakan tambak yang kosong (yang secara tidak langsung tidak digunakan untuk produksi garam) seperti tandon dan caren digunakan untuk budidaya bandeng. Cara ini diharapkan dapat lebih meningkatkan produktifitas lahan, meningkatkan penerimaan, serta mengurangi kegagalan usaha tambak garam. Upaya diversifikasi sumber-sumber pendapatan merupakan salah satu strategi yang dapat dikembangkan dalam kondisi sumberdaya yang terbatas, seperti yang telah dilaporkan pada kasus pengembangan budidaya laut di Filipina (Salayo *et al.*, 2012).

### Teknis Produksi Garam dan Bandeng

Peralatan yang digunakan untuk usaha tambak umum masih bersifat tradisional, walau terdapat sedikit peningkatan. Hasil penelitian Rachman (2011) juga menunjukkan umumnya petani garam tidak mampu memproduksi dengan teknologi yang lebih tinggi karena tidak memiliki modal yang cukup, meskipun telah ada cara pembuatan garam baru, misalnya sistem ulir atau disebut teknologi ulir filtrasi.

Penelitian ini menunjukkan dari total responden sejumlah 30 orang, 29 responden tidak lagi



Gambar 1. Model usaha dan analisis usaha tambak garam di Desa Gedongmulyo, Kecamatan Lasem, Rembang.

menggunakan kincir sebagai alat suplai air, tapi telah menggunakan pompa air. *Beumeter* atau meteran yang digunakan untuk mengukur kadar kepekatan air (air tua) dalam petakan garam telah digunakan oleh petambak. Peralatan lainnya rata-rata masih terbuat dari kayu dan bahan bekas seperti tolak (pengangkut garam), *ebor* (saluran irigasi dari bahan jerigen bekas dan kayu) dan silinder. Tahapan proses produksi garam sebagai berikut:

Pengeringan Lahan

Lahan dikeringkan terlebih dahulu selama kurang lebih 20 hari. Pada proses pengeringan ini, bagian tandon masih terisi air dapat digunakan untuk memelihara bandeng. Pada bagian lain, seperti caren yang akan dikeringkan, maka dilakukan pepanenan bandeng, sebelum tahapan pegeringan dilakukan.

Penataan Lahan

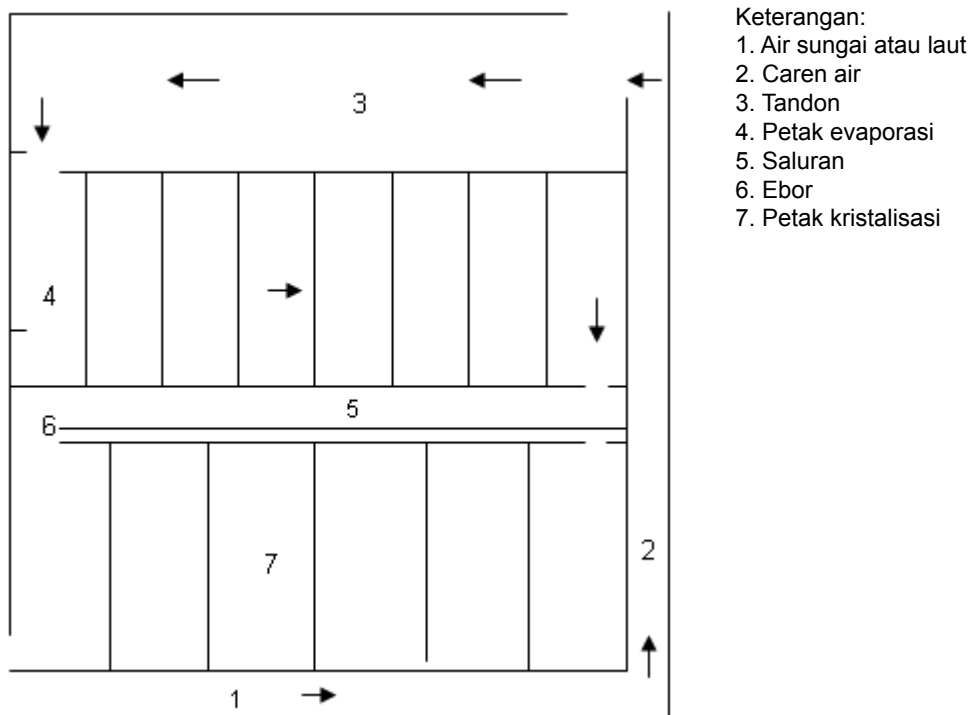
Penataan ini meliputi tanggul, saluran air, petak evaporasi, dan petak kristalisasi. Cara yang dilakukan pertama kali adalah mengaliri air ke petak, kemudian tanggul dan saluran air diperbaiki menggunakan cangkul, lalu petakan di bolak-balik vertikal horizontal secara manual menggunakan kaki, diratakan menggunakan *garuk*, *diselinder* bersamaan dengan penyiraman air laut menggunakan gayung, dan terakhir dialiri air untuk memulai proses pembuatan garam.

Proses Produksi

Aliran air dari laut atau sungai masuk ke caren, yang biasanya dengan kepekatan air 3-4<sup>o</sup>Be (Gambar 2, nomor 1). Dari caren air dialirkan ke tandon (nomor 2 dan 3) yang luasnya 1/3 dari lahan. Tandon atau caren tersebut kemudian digunakan untuk produksi bandeng. Pada luasan satu hektar lahan (tandon dan caren) biasanya ditebari 2000-4000 benih bandeng ukuran 2-3 cm (sebesar asem dalam ukuran lokal) atau 4-5 cm (segilang). Harga gelondongan bandeng berkisar Rp55-65/ekor. Bandeng tersebut dipelihara rata-rata dari bulan Juli hingga Januari.

Air dari tandon selanjutnya dialirkan ke petak-petak evaporasi (nomor 4). Posisi tandon harus lebih tinggi dari petak evaporasi untuk mempermudah air mengalir. Volume air laut dari tiap petak kristalisasi yang mengalami proses penguapan akan berkurang, sehingga air dialirkan dan disatukan dalam satu petak evaporasi. Air dari satu petak evaporasi akan masuk ke saluran air (nomor 5) hingga ke penampungan dan siap *diebor* (nomor 6). Di penampungan tersebut, air diukur kekekatannya. Apabila air telah tua (22-23<sup>o</sup>Be) maka air dialirkan ke petak kristalisasi (nomor 7), dan jika belum, maka *diebor* kembali masuk ke petak evaporasi.

Air pada petak kristalisasi akan dibiarkan hingga kepekatan 24<sup>o</sup>Be. Kepekatan air dalam petak sangat penting, tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi



Gambar 2. Pemasukan air tambak garam (tanda panah merupakan arah aliran air masuk).

(melebihi  $29^{\circ}\text{Be}$ ) karena akan mempengaruhi mutu garam yang dihasilkan. Karena itu, pegaram selalu melakukan kontrol terhadap kepekatan air.

Satu petak tambak garam dengan luasan 1 hektar biasanya dikerjakan oleh 2 hingga 3 penggarap. Untuk lahan kurang dari satu hektar, dikerjakan sendiri oleh keluarga pemilik lahan. Sebelum mengerjakan, penggarap diberikan *bon* atau bayaran terlebih dahulu sebesar Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Sistem pembayaran penggarap dan pemilik adalah bagi hasil. Biasanya dilakukan bagi hasil dalam bentuk uang, meskipun ada cara bagi hasil yang dilakukan dengan membagi garam hasil produksi. Garam hasil produksi setelah dijual dikurangi biaya diesel 10%, lalu dibagi rata (50:50) antara penggarap dan pemilik. Uang yang diterima penggarap masih dikurangi uang *bon* yang sebelumnya diberikan. Apabila garam masuk gudang, maka penggarap *ditorok* oleh pemilik lahan. Jadi akan menerima uang bagi hasil sesuai harga saat itu.

#### Panen

Garam baru dapat dipanen sekitar 20 hingga 25 hari dari tahap lahan yang *diselinder*. Setelah itu, garam dapat di panen setiap hari. Seharusnya, pemanenan dilakukan setiap minimal 10 hari sekali, namun karena kebutuhan keluarga, panen dilakukan setiap hari. Garam dikumpulkan di satu titik tertentu menggunakan garuk, lalu diangkut ke gudang menggunakan tolak. Rata-rata garam dijual ke tengkulak.

#### Biaya Usaha Tambak Garam

Biaya yang dikeluarkan dalam usaha tambak garam meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang relatif tetap jumlahnya, dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit. Komponen biaya tetap meliputi biaya sewa lahan, pajak lahan, persiapan lahan, penyusutan alat, dan perawatan alat. Biaya tetap yang paling banyak dikeluarkan adalah biaya sewa lahan, yaitu sebesar Rp8.128.205(76,28%) dan yang paling sedikit dikeluarkan adalah biaya perawatan alat yaitu Rp109.891 (1,03%). Sewa lahan menjadi keputusan terpenting yang perlu

dipertimbangkan oleh petambak, karena melalui perluasan lahan petambak dapat meningkatkan produksi dan pendapatan (Wiradi, 1984). Hasil penelitian Rochwulaningsih (2007) bahkan secara tegas menunjukkan lahan menjadi faktor yang sangat penting dalam kegiatan produksi garam karena luasan lahan garam menentukan kapasitas produksi garam dan kemampuan mengakapitalisasi surplus produksi. Karena itu pegaram dengan penguasaan lahan yang luas akan memiliki akses dan dapat menikmati surplus dari produksi garam. Rata-rata biaya tetap usaha tambak garam dapat dilihat pada Tabel 2.

Biaya variabel merupakan biaya yang besar-kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh. Komponen biaya variabel usaha tambak garam meliputi tenaga kerja, pupuk, obat-obatan, pakan, benih, transportasi, dan bahan bakar. Biaya variabel yang paling banyak dikeluarkan adalah biaya tenaga kerja yaitu sebesar Rp23.242.457(87,29%) dan biaya yang paling sedikit dikeluarkan adalah transportasi sebesar Rp45.300(0,17%). Rata-rata biaya variabel usaha tambak garam dapat dilihat pada Tabel 3.

Tenaga kerja yang dihitung adalah tenaga kerja luar keluarga, dengan rata-rata pembayaran menggunakan sistem bagi hasil. Namun demikian, penelitian mengidentifikasi satu responden menggunakan perhitungan HOK (Hari Orang Kerja) untuk membayar pekerja dalam produksi garam, yaitu dengan biaya Rp40.000 per orang per hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan responden yang menggunakan sistem pembayaran HOK lebih besar yaitu sebesar Rp16.931.933 dibandingkan responden yang menggunakan sistem bagi hasil dalam luas yang sama yaitu 1 hektar, dan dengan jumlah tenaga kerja yang sama yaitu 1 orang. Gambaran ini mengindikasikan bahwa usaha tambak garam jika dikembangkan dengan model pengelolaan tenaga kerja berbasis HOK, maka usaha tambak lebih menguntungkan. Namun demikian, pilihan ini tidak banyak diambil oleh pegaram karena pertimbangan tenaga kerja yang digunakan adalah sebagian besar tenaga kerja yang masih memiliki

Tabel 2. Rata-rata biaya tetap usaha tambak garam pada luas lahan 1 hektar/tahun.

No	Uraian	Garam (Rp/musim)	Bandeng (Rp/siklus)	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
1	Sewa lahan	8.128.205		8.128.205	76,28
2	Pajak lahan	115.022		115.022	1,08
3	Persiapan lahan	0	614.761	614.761	5,77
4	Penyusutan alat	1.557.610	130.000	1.687.610	15,84
5	Perawatan alat	109.891	0	109.891	1,03
	Total	9.910.728	744.761	10.655.489	100,00

Tabel 3. Rata-rata biaya variabel usaha tambak garam pada luas lahan 1 hektar/tahun.

No	Uraian	Garam (Rp/ musim)	Bandeng (Rp/ siklus)	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
1	Tenaga kerja	19.474.413	1.420.218	20.894.631	84,90
2	Bahan bakar	1.425.531	0	1.425.531	5,79
3	Benih	0	339.905	339.905	1,38
4	Obat-obatan	0	615.068	615.068	2,50
5	Pupuk	0	331.744	331.744	1,35
6	Pakan	0	960.000	960.000	3,90
7	Transportasi	0	45.300	45.300	0,18
Total		20.899.944	3.712.235	24.612.179	100,00

hubungan persaudaraan, walaupun secara ekonomi lebih menguntungkan. Sehingga, sistem bagi hasil menjadi semacam jaring pengaman sosial dalam usaha tambak garam (produksi). Indikasi seperti ini juga telah diungkapkan oleh Cox (2008) bahwa rumah tangga di negara berkembang banyak menggantungkan pada hubungan persahabatan dan keluarga untuk sumber penghidupan, bahkan dalam kaitan distribusi ekonomi.

Biaya untuk bahan bakar yang dikeluarkan sebesar 5,79%. Penggunaan bahan bakar tergantung dari intensitas cahaya matahari, saat panas terik membutuhkan lebih banyak air untuk dialirkan ke petakan karena garam cepat menjadi kristal, maka garam lebih banyak yang diproduksi. Pasang surut air laut juga mempengaruhi banyaknya bahan bakar yang dikeluarkan jika lahan yang dikelola dekat dengan laut, saat pasang petambak tidak memerlukan tenaga dari pompa air, maka biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan bakar berkurang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya bahan bakar yang murni dikeluarkan dibandingkan biaya bahan bakar dari perjanjian sistem bagi hasil sebelumnya yaitu 10% dari penerimaan, rata-rata lebih sedikit biaya bahan bakar yang murni dikeluarkan, sehingga sisanya masuk ke tambahan penerimaan bahan bakar. Kelebihan dari alokasi biaya bahan bakar tersebut menjadi keuntungan yang dinikmati oleh pemiliki tambak garam dalam usaha bagi hasil.

#### *Pendapatan Pegaram*

Penerimaan diperoleh dari hasil penjualan garam dan bandeng. Nilai produksi diperoleh dari total produksi garam dan bandeng (ton atau kg) dikalikan dengan harga jual (Rp). Harga jual tergantung dari kualitas hasil produksi dan harga di pasaran. Pendapatan diperoleh dari selisih penerimaan dengan total biaya. Pendapatan total diperoleh dari total pendapatan ditambah dengan total biaya.

Total biaya produksi usaha tambak garam mencapai Rp35.267.668 per hektar dengan total penerimaan sebesar Rp53.076.281, sehingga pendapatan usaha mencapai Rp17.808.613. Total pendapatan tersebut masing-masing disumbang oleh usaha pegaraman sebesar Rp10.498.009 (58,95%) dan budidaya bandeng sebesar Rp7.310.604 (41,05%). Rincian pendapatan usaha tambak garam pada tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 4.

#### *R/C rasio*

R/C ratio usaha tambak garam di Desa Gedongmulyo diketahui sebesar 1,53 yang berarti usaha tambak garam layak untuk dilaksanakan dan dikembangkan. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap Rp 100,- biaya yang dikeluarkan untuk tambak garam, maka akan diperoleh penerimaan sebesar Rp 150,-. Hasil R/C rasio serupa juga dijelaskan oleh Amaliya (2007) yang melakukan penelitian tentang analisis finansial usaha tambak garam di desa pinggirpapas memperoleh hasil R/C metode maduris sebesar 5,01 dan metode portugis sebesar 3,08. Karena itu, usaha garam sesungguhnya secara finansial masih menguntungkan dan dapat terus dikembangkan. Namun demikian, catatan Rohwulaningsih (2007) tentang kurang-berdayaan produsen garam berhadapan dengan para pelaku pasar hasil produk garam menjadikan tantangan pengembangan usaha ini. R/C rasio usaha tambak garam dapat dilihat pada Tabel 5.

#### *Sistem Bagi Hasil*

Bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan telah lama dikenal diberbagai daerah dengan istilah yang berbeda-beda, seperti di Minahasa "toyo", Jawa Tengah dan Jawa Timur "maro" atau "mertelu", sedangkan di Lombok dikenal dengan "nyakap". Sistem bagi hasil telah dijelaskan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 1960 (UU 2/1960) tentang perjanjian bagi hasil. Namun dalam UU tersebut tidak secara tegas menyebutkan besarnya bagian yang

Tabel 4. Pendapatan usaha tambak garam pada luas lahan 1 hektar/tahun.

No	Uraian	Garam		Bandeng		Jumlah (Rp)
		Nilai (Rp)	Persentase (%)	Nilai (Rp)	Persentase (%)	
I	Total Penerimaan	41.308.681	77,83	11.767.600	22,17	53.076.281
II	Biaya Tetap	9.910.728	93,01	744.761	6,99	10.655.489
	Biaya Variabel	20.899.944	84,92	3.712.235	15,08	24.612.179
	Total Biaya	30.810.672	87,36	4.456.996	12,64	35.267.668
III	Total Pendapatan	10.498.009	58,95	7.310.604	41,05	17.808.613

Tabel 5. R/C ratio usaha tambak garam pada luas lahan 1 hektar/tahun.

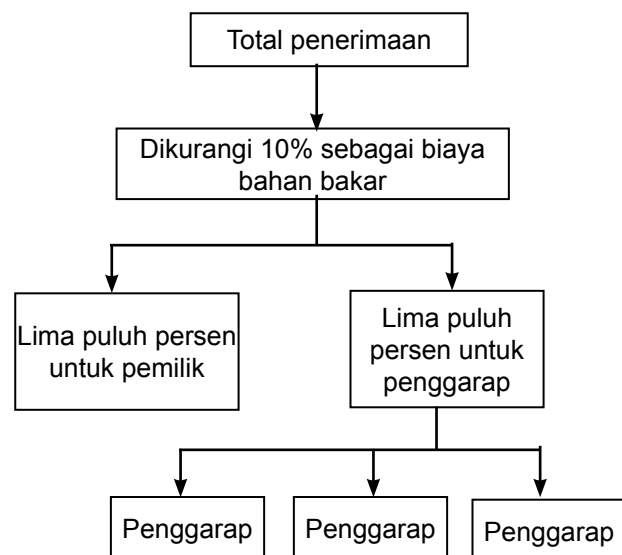
No	Uraian	Garam (Rp)	Bandeng (Rp)	Total (Rp)
1	Penerimaan	41.308.681	11.767.600	53.076.281
2	Jumlah biaya	30.810.672	4.456.996	35.267.668
R/C				1,50

harus diterima pemilik dan atau penggarap yang diperoleh dari usaha bersama, karena tiap daerah mempunyai pola bagi hasil yang berbeda. Namun terdapat pedoman perimbangan bagi hasil dalam UU tersebut, yaitu antara pemilik dan penggarap adalah 1:1, atau 1/3 pemilik dan 2/3 penggarap (Rasyid, 2006).

Hubungan antara pemilik dan penggarap lahan tambak di desa Gedongmulyo masih secara kekeluargaan, saling percaya, dan saling tolong menolong. Belum pernah terjadi sengketa, padahal tidak ada perjanjian tertulis antara keduanya. Pemilik atau penyewa lahan sebagai seorang yang memiliki kuasa atas lahan tersebut tidak mempunyai cukup waktu atau kecakapan untuk mengelola lahan yang dimiliki, dapat juga karena lahan yang dimiliki sangat luas, sehingga tidak dapat menggarap sendiri dan membutuhkan penggarap. Sedangkan penggarap mempunyai keinginan untuk mendapatkan hasil atas lahan yang digarap. Penggarap mempunyai kemampuan dan waktu, namun tidak mempunyai lahan atau lahan yang dimiliki sangat sempit.

Berdasarkan hasil wawancara, penggarap yang dipekerjakan adalah saudara sendiri. Tenaga kerja usaha tambak bandeng rata-rata menggunakan tenaga kerja dalam keluarga, dari 30 responden hanya tiga responden yang pengelolaan usaha tambak bandeng dikelola oleh tenaga kerja luar keluarga (penggarap) menggunakan sistem bagi hasil 50:50. Sistem bagi hasil usaha garam yang diterapkan di Desa Gedongmulyo adalah total penerimaan dikurangi biaya bahan bakar 10%, penerimaan tersebut lalu dibagi dua 50:50 antara pemilik dan penggarap. Bagian 50 untuk penggarap masih harus dibagi lagi dengan jumlah penggarap dalam satu lahan yang sama. Potongan 10% biaya bahan bakar

cenderung lebih besar dari biaya bahan bakar yang murni dikeluarkan, sehingga sisa uang bahan bakar menjadi bagian penerimaan pemilik tambak. Skema bagi hasil tambak garam di Desa Gedongmulyo disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Sistem bagi hasil usaha tambak garam tahun 2012.

#### Permasalahan dan Pengelolaan Usaha Tambak Garam

Usaha tambak garam menguntungkan jika dilihat dari rata-rata pendapatan dan R/C rasio, namun terdapat beberapa permasalahan diantaranya musim dan harga garam. Usaha tambak garam yang dilakukan secara tradisional sepenuhnya tergantung pada cuaca (intensitas cahaya matahari). Semakin panjang musim kemarau, maka semakin besar kesempatan untuk memproduksi garam, sehingga penerimaan selama satu musim diharapkan akan



naik. Kondisi iklim dan cuaca yang berubah saat ini pegaram kesulitan membuat keputusan secara tepat terkait usahanya. Hal ini menyebabkan semakin meningkatkan faktor ketidakpastian dalam usaha. Tahun 2011 dan 2012, petambak garam memulai usahanya pada bulan Juni dan berakhir pada bulan November, sedangkan tahun 2013 petambak garam desa Gedongmulyo baru memulai usahanya pada bulan Agustus. Kondisi iklim yang berubah tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi produksi garam dan usaha garam secara umum di masa-masa yang akan datang. Berbagai proyeksi tentang produksi pangan dan kecenderungan perubahan iklim di wilayah tropis menunjukkan potensi dampak negatif perubahan tersebut baik terhadap produksi maupun aspek sosial ekonomi (Morton, 2007; Dewi, 2009).

Garam memang telah banyak dikenal sebagai produk yang cenderung naik turun harga per satuannya. Selain dipengaruhi oleh kualitas garam dan banyaknya garam yang beredar di pasar, patokan harga dari tengkulak juga sangat mempengaruhi harga. Pegaram di Desa Gedongmulyo umumnya menjual garam pada tengkulak. Rata-rata harga garam di tahun 2012 sebesar Rp300,-, padahal berdasarkan penetapan harga garam oleh pemerintah sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 02/DAGLU/PER/5/2011 tentang Penetapan Harga Penjualan Garam di Tingkat Pegaram, untuk garam kualitas dua seperti yang diproduksi di Desa Gedongmulyo, harga terendah yang ditetapkan adalah Rp550/kg (lima ratus lima puluh rupiah) per kilogram. Kondisi ini mungkin terjadi karena pelaku pasar garam menguasai aset-aset penting perdagangan garam, baik aset fisik berupa gudang-gudang garam yang terletak di lokasi strategis (pinggir jalan raya) maupun aset jaringan pasar, yang tidak dapat akses atau dikuasai oleh produsen garam (Rochwulaningsih, 2007).

Untuk mengelola ketidak-pastian baik diakibatkan oleh alam maupun tata niaga usaha pegaraman, maka diperlukan berbagai upaya untuk melindungi pelaku usaha. Secara kelembagaan, koperasi dibutuhkan untuk dapat membantu menerapkan kebijaksanaan harga dasar dengan ikut dalam kegiatan pengadaan garam untuk keperluan stok nasional dan pasaran umum. Dengan adanya koperasi, hasil produksi garam diharapkan dapat dibeli sesuai harga patokan pemerintah dan memberi kemudahan mendapatkan kredit agar tidak jatuh pada tengkulak karena himpitan ekonomi petani garam. Karena itu, pengelolaan usaha tambak garam dengan model kelembagaan

yang lebih baik perlu dikembangkan agar usaha ini secara sosial dan ekonomi akan terus memberikan keuntungan.

### Kesimpulan dan Saran

1. Tambak garam di Desa Gedongmulyo memiliki ciri khusus yaitu dikelola bersama budidaya bandeng untuk meningkatkan efektifitas lahan dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan usaha.
2. Berdasarkan struktur biaya usaha per hektar tambak garam diketahui biaya sewa lahan dan biaya tenaga kerja menjadi komponen biaya usaha terbesar. Kedua komponen biaya tersebut menjadi penentu kapasitas produksi garam.
3. Total penerimaan usaha tambak garam mencapai Rp53.076.281 per hektar dan usaha pegaraman menyumbang sebesar 77,83%. Rerata pendapatan petambak garam per hektar diperkirakan sebesar Rp17.808.613, dengan R/C rasio 1,50. Hasil tersebut menunjukkan usaha tambak garam layak untuk diusahakan dan dikembangkan.
4. Usaha tambak secara finansial menguntungkan, namun terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan penanganan baik di tingkat pegaram (produsen), pelaku pasar, maupun pengambil kebijakan. Faktor alam, terutama variabilitas iklim memerlukan pengelolaan sistem informasi dan perkiraan cuaca secara lebih baik dan tepat. Pengelolaan usaha tambak garam dengan model kelembagaan yang lebih baik perlu dikembangkan agar usaha ini secara sosial dan ekonomi akan terus memberikan keuntungan.

### Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini dibiayai oleh Hibah penelitian Jurusan Perikanan melalui Dana RKAT Fakultas Pertanian tahun 2013.

### Daftar Pustaka

- Anonim. 2011a. Pemetaan kawasan budidaya perikanan kabupaten rembang. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. Rembang. Tidak Dipublikasikan.
- Anonim. 2011b. Buku profil desa gedongmulyo tahun 2011. Rembang. Tidak Dipublikasikan.

- Dewi, P.P. 2007. Climate change impacts on tropical agriculture and the potential of organic agriculture to overcome these impacts. *Asian Journal of Food and Agro-Industry*, Special Issue: S10-S17.
- Cox, D. 2008. Extended family and kinship networks: Economic insights and evolutionary directions, in *handbook of development economics 4*: 3711-3784.
- Morton, J.F. 2007. The impact of climate change on smallholder and subsistence agriculture *proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 104 (50): 19680–19685.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.58/M-Dag/Per/9/2012 tentang Ketentuan impor garam.
- Rochwulaningsih, Y. 2007. Petani garam dalam jeratan kapitalisme: Analisis kasus petani garam di rembang, Jawa Tengah. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 20(3): 228 – 239.
- Rochwulaningsih, Y., S. Susilowati., & H. Rinardi. 2009. Kajian struktur usaha garam rakyat di Kabupaten Rembang sebagai dasar penyusunan konsep pemberdayaan sosial ekonomi petani garam. <<http://www.lppm.undip.ac.id/abstrak/content/view/633/288/>> Diskases pada 28 Desember 2012.
- Rusliana, R. 2013. Tinjauan pasar garam. *Buletin kementerian perdagangan edisi garam/Agustus/2013*. [http://ews.kemendag.go.id/download.aspx?file=121207\\_ANK\\_PKM\\_PBK\\_garam+Rev+1.0.pdf&type=publication](http://ews.kemendag.go.id/download.aspx?file=121207_ANK_PKM_PBK_garam+Rev+1.0.pdf&type=publication).
- Rachman, A. 2011. Evaluasi kinerja usaha petani garam rakyat (studi kasus di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat). Institut Pertanian Bogor. Tesis.
- Rasyid, A. Tinjauan pelaksanaan perjanjian bagi hasil garam rakyat di Kecamatan Pranggan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep madura. Universitas Gadjah Mada. Tesis.
- BPS. 2012. Rembang dalam angka 2012. Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang.
- Salayoa, N.D., M.L. Perez, L.R. Garces & M.D. Pido, 2012. Mariculture development and livelihood diversification in the Philippines. *Marine Policy* 36(4): 867–881.
- Soekartawi. 1995. Analisis usaha tani. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Wiradi, G. 1984. Dasar-dasar usaha tani di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.